

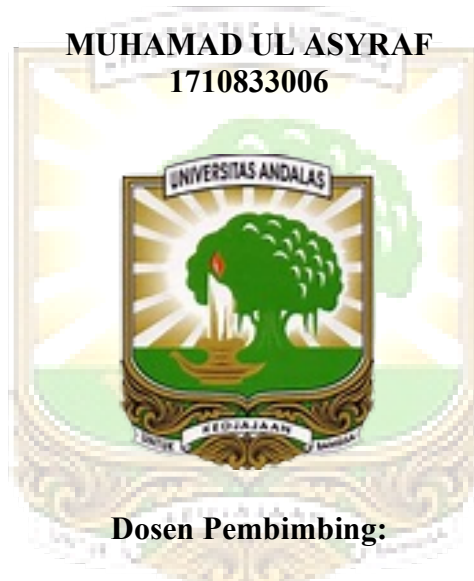
**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KOTA
BUKITTINGGI.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**MUHAMAD UL ASYRAF
1710833006**



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Aidinil Zetra, MA**
- 2. Lusi Puspika Sari, S.IP.M.IP**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Bukittinggi. Sistem pembayaran *e-money* di Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020. Permasalahan yang dihadapi, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui penerapan kebijakan ini, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tentang cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tipe studi kasus. Pada hasil temuan penelitian ini, ternyata pengimplementasian Peraturan Walikota No. 32 tahun 2020 di Kota Bukittinggi ini tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Merilee S. Grindel terdapat dua indikator, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pada isi kebijakan, terdapat enam variabel dalam menjelaskan isi kebijakan. Mengenai isi kebijakan, implementasi Peraturan Walikota ini tidak berjalan dengan maksimal, karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara masif, dan berbagai faktor lainnya seperti kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya. Kemudian mengenai lingkungan kebijakan, terdapat faktor-faktor yang membuat implementasi kebijakan ini tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik rezim dan institusi yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Kata kunci : *E-money*, Implementasi, Kebijakan

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of Mayor Regulation No. 32 Concerning the Implementation of Collection, Payment, Deposit, and Places for Payment of Retribution for Recreational and Sports Places in the City of Bukittinggi. The e-money payment system in the City of Bukittinggi is regulated in Mayor Regulation Number 32 of 2020. The problems faced are that many people do not know the implementation of this policy, therefore this study aims to explain and analyze the implementation of Mayor Regulation no. 32 Concerning the Implementation of Collection, Payment, Deposit, and Places for Payment of Retribution for Recreational and Sports Places in the City of Bukittinggi. This study uses a qualitative method, with the type of case study. In the findings of this study, it turns out that the implementation of Mayor Regulation No. 32 of 2020 in Bukittinggi City is not going well. As stated by Merilee S. Grindel, there are two indicators, namely the content of the policy and the policy environment. In the content of the policy, there are six variables in explaining the content of the policy. Regarding the content of the policy, the implementation of this Mayoral Regulation does not run optimally, because the government does not carry out massive socialization, and various other factors such as influencing interests, types of benefits, degree of change, location of decision making, program implementers, and resources. Then regarding the policy environment, there are factors that make the implementation of this policy not run optimally. It relates to the power, interests and strategies of the actors involved, the characteristics of the regime and institutions in power, and the level of compliance and responsiveness.

Keywords : E-money, Implementation, Policy